

Religious Moderation: Humanitarian Values from Pope Francis Arrival in Indonesia at The End of 2024

Moderasi Beragama: Nilai-Nilai Kemanusiaan Dari Kedatangan Paus Fransiskus Ke Indonesia Di Penghujung Tahun 2024

Ahmad Putra

UIN Imam Bonjol Padang

*Corresponding Author: pratamaahmad954@gmail.com

Syaiful Adnan

Kepala MAS Al-Falah Padang

Email: syaifuladnan588@gmail.com

Yulia Fitria

Nanchang University, Tiongkok

Email: Yuliafitria293@gmail.com

Syafrizal Efendi

Institut Agama Islam (IAI) Sumatera Barat-Pariaman

Email: syafrizalefendi1975@gmail.com

Andrianto

Institut Agama Islam (IAI) Sumatera Barat-Pariaman

Email: andriantotkibrahim@gmail.com

Bima Prasetya

Universitas Padjadjaran

Email: bmaprstya@gmail.com

Abstract: *a history where Indonesia was visited by one of the world figures named Pope Francis who is the highest leader of the world's Catholic church. He came with the aim of voicing a message of unity between religious communities towards a better humanity and living in harmony in differences. Although in addition, he wanted to meet with the Catholic community in Indonesia and build cooperation between his country, namely the Vatican and Indonesia. The common thread in this study is to see what forms of religious moderation emerged with the arrival of Pope Francis to Indonesia, where the majority of Indonesian society is filled with Muslims. This study uses a qualitative approach with the library research method, in which case the researcher utilizes information obtained from scientific works, books, and reliable sources. The results of this study show that: first, the arrival of Pope Francis was greeted with joy by the majority of Indonesian people, second, Pope Francis' mission is to voice people to live in harmony within the framework of religious differences, third, Pope Francis kissed the hand of the Grand Imam of the Istiqlal Mosque and the Grand Imam of the Istiqlal Mosque kissed Pope Francis' head, fourth, security guards through the Police and TNI during Pope Francis' activities in Indonesia.*

Keywords: *Religious Moderation, Pope Francis, Unity*

Abstrak: sebuah sejarah di mana Indonesia kedatangan salah satu tokoh dunia bernama Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja Katolik dunia. Beliau datang dengan tujuan untuk menyuarakan pesan persatuan antar umat beragama menuju kemanusiaan yang lebih baik dan hidup rukun dalam perbedaan. Meskipun di samping itu, ingin bertemu dengan masyarakat Katolik yang ada di Indonesia serta membangun kerja sama negara beliau yaitu Vatikan dengan Indonesia. Benang merah dalam penelitian ini ialah melihat apa saja bentuk moderasi beragama yang muncul dengan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia yang mana masyarakat Indonesia mayoritas diisi oleh masyarakat muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*, yang dalam hal ini peneliti memanfaatkan informasi yang didapatkan dari karya ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, kedatangan Paus Fransiskus disambut dengan suka cita mayoritas masyarakat Indonesia, *kedua*, Misi Paus Fransiskus yaitu untuk menyuarakan umat agar hidup rukun dalam bingkai perbedaan agama, *ketiga*, Paus Fransiskus mencium tangan Imam besar Masjid Istiqlal dan Imam Besar Masjid Istiqlal mencium kepala Paus Fransiskus, *keempat*, penjagaan dari pihak keamanan melalui Polri dan TNI selama kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Paus Fransiskus, Persatuan

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari sisi agama, suku, budaya dan sebagainya (Siti Fatimah et al, 2023: 2). Perbedaan tersebut sudah ada dan berjalan dalam tempo yang lama bahkan sampai saat ini. Kendati demikian, persoalan demi persoalan tentu tidak bisa disembunyikan terutama berkaitan dengan ketegangan antara mayoritas dengan minoritas di Indonesia (Latifatul Mahbubah et al, 2022: 14).

Ketegangan tersebut seperti yang dilansir dari salah satu sumber yaitu balitbangdiklat.kemenag.go.id, di mana terdapat beberapa aspek-aspek yang berpotensi dan dapat mengganjal upaya integrasi dan kerukunan antara mayoritas dengan minoritas, diantaranya: *pertama*, adanya aspirasi dan kehendak sebagian tokoh setempat untuk melepaskan diri dari NKRI di Papua, *kedua*, adanya aspirasi sementara tokoh Kaharingan untuk melepaskan diri dari Kelompok Hindu di Kapuas, *ketiga*, perilaku penodaan agama (Hostia) yang sesekali muncul di lingkungan kelompok Katolik di Kupang (NTT), *keempat*, Keluhan masih adanya kesulitan mendirikan tempat ibadah dan kuburan bagi masyarakat Muslim, *kelima*, fenomena praktek KKN yang masih menggejala serta upaya penegakan hukum yang tumpul, *keenam*, sentimen kesukuan dan kedaerahan cenderung makin kental, *ketujuh*, kesenjangan kehidupan ekonomi dan sosial antara kelompok minoritas pendatang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kelompok mayoritas yang merupakan masyarakat setempat (Balitbangdiklat, 2025).

Jika mencoba melihat catatan ke tahun-tahun belakang, terdapat salah satu contoh kekerasan yang terjadi akibat diskriminasi adalah insiden yang menimpa Gereja Santa Clara di Bekasi. Walaupun gereja ini telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tanggal 28 Juli 2015, namun massa dari berbagai organisasi masyarakat menentang pembangunan gereja tersebut. Padahal, selain telah mendapatkan IMB, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi juga memberikan rekomendasi atas pembangunan Gereja Santa Clara. FKUB mengklaim pembangunan gereja tersebut telah mematuhi

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Selain itu, pada 8 Agustus 2020, terjadi insiden serangan intoleran yang menyerang upacara malam sebelum ijab kabul, atau biasa disebut midodareni, di persemayaman Alm. Assegaf bin Jufri di Solo. Insiden ini mengakibatkan luka-luka pada tiga orang dan kerusakan pada berbagai kendaraan milik keluarga korban. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan diskriminasi tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga mengancam ketertiban dan kedamaian masyarakat (Kumparan.com, 2025). Idealnya, konstitusi Indonesia menyatakan dengan jelas bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada tempat bagi praktik diskriminasi dalam bentuk apapun. Meskipun demikian, kenyataannya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas (Siti Barora Sinay, 2020: 153).

Peraturan-peraturan ini termasuk Undang-Undang tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tahun 1965, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, dan berbagai ketentuan lainnya yang masih dianggap diskriminatif. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat penegakan hukum dalam memastikan hak-hak masyarakat. Selain itu, pemenuhan hak-hak seluruh masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan bahasa juga merupakan kunci dalam mencapai stabilitas dan kedamaian hidup bersama (Kusnadi dan Nisa Arafiah Tri Wulandari, 2024: 540). Jika hak-hak kelompok minoritas tidak diakomodasi dengan baik, hal ini dapat memicu konflik diskriminasi dan ketegangan yang berpotensi mengancam integritas dan ketahanan nasional.

Meskipun masih ada banyak isu diskriminasi di Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa negara ini telah mengakui hak-hak kelompok minoritas sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, yang ditunjukkan dengan beragamnya suku dan agama yang diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan publik di Indonesia (Muhammad Hanif Ihsani, 2022: 96). Selain itu, sosial media juga memainkan peran yang signifikan, di mana dengan penggunaan yang tepat, dapat menjadi alat untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga persatuan antar masyarakat. Namun, jika tidak digunakan dengan baik, sosial media justru dapat mengancam dan memperburuk kondisi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dan bahkan dapat menjadi faktor baru dalam isu diskriminasi (Moulida Azizah et al, 2024: 16206).

Dari persoalan dan ketegangan antara mayoritas dengan minoritas yang ada di Indonesia perlu kembali merakit perbedaan menjadi sebuah keniscayaan, karena sejatinya perbedaan itu ialah sebuah hal yang perlu diterima dengan cara yang bijaksana. Perbedaan itulah yang dinamakan dengan moderasi beragama dan masyarakat Indonesia mesti siap menerima semua itu (Nurus Shalihin, 2021: 188). Beberapa minggu yang lalu, Indonesia kedatangan tokoh dunia yang merupakan pemimpin gereja Katolik dunia yang juga sebagai Presiden negara Vatikan yakni Paus Fransiskus. Kunjungan ke Indonesia bukan tanpa sebab, beliau datang selain untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia yang beragama Katolik, namun juga menyampaikan misi perdamaian untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia untuk hidup rukun serta damai dalam perbedaan.

Kenapa Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia? karena Indonesia adalah sebuah negeri tempat tumbuh subur beragam kebudayaan dan kecerayaan yang di pelihara dan dijaga oleh masyarakatnya. Di negeri ini terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis serta 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa (Syaeful Anwar dan Mahmudi, 2024: 2251). Keberagaman inilah yang mendukung banyak para tokoh dunia dalam melakukan kunjungan ke Indonesia terutama dalam kaitannya dengan moderasi beragama seperti yang digaungkan dunia saat ini.

Istilah moderasi beragama menjadi populer sejak tahun 2019. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Wacana moderasi beragama menjadi core dalam kegiatan akademik maupun keagamaan khususnya di Kementrian Agama dan di PTKIN. Sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim sengaja mengutamakan moderasi beragama menjadi corak dan karakter khas keberagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Begitu juga lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa yang juga menjadikan tahun 2019 sebagai *The Internasional Year of Moderation* atau Tahun Moderasi Internasional (Dinar Bela Ayu Naj'ma & Syamsul Bakri, 2021: 424).

Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kelompok *library research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan pembacaan dan penulisan dari berbagai *literature*, baik itu jurnal, media sosial, surat kabar maupun buku. *Library research* mendapati atau mengumpulkan data-data analisis dengan melakukan dokumentasi dari literatur sebelumnya sekaligus memverifikasi keabsahan data guna memudahkan dalam membuat kesimpulan. Dengan analisis-deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang relevan secara universal di kalangan umum khususnya di dunia penelitian. Maka dengan itu, menarik untuk melihat moderasi beragama: nilai-nilai kemanusiaan dari kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia di penghujung tahun 2024 yang lalu.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Toleransi Islam dengan Kristen dan sebaliknya

Agama memiliki nilai dan dampak signifikan bagi sebuah bangsa agar mendukung berjalannya berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua orang, baik dari sisi ibadah, sosial, dan lain sebagainya. Bangsa yang besar dan hebat tentunya harus mengakui dan memahami bahwa keragaman beragama ialah hak serta kebebasan setiap individu, salah satunya bebas beragama dan berkeyakinan. Salah satu dari semua itu ialah toleransi yang diperlihatkan oleh masyarakat penganut agama Islam dengan kristen, begitupun sebaliknya. Sejarah sudah menjelaskan dan memaparkan betapa panjangnya sejarah yang terlukis di Indonesia terutama perihal beragamnya keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan sampa hari ini pun masih berjalan dengan saling merangkul satu sama lain.

Toleransi secara terminologi didefinisikan Abu A'la Maududi, yaitu suatu sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain meskipun hal tersebut merupakan sesuatu keliru menurut pandangan kita. Kita tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan untuk mengubah keyakinannya, atau dengan menghalang-halangi mereka melakukan sesuatu (Abu al-A'la al-Maudūdi, 1980: 39). Dalam kehidupan sosial, Rasulullah mengajarkan

kepada pengikutnya untuk berinteraksi dengan non-muslim dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, kebaikan dan keadilan. Seperti yang terjadi antara Asma binti Abu Bakar dengan ibunya, Qutailah. Suatu ketika Qutailah, datang untuk mengunjungi putrinya dengan membawakan beberapa hadiah. Namun Asma' tidak menerima pemberian tersebut, karena ibunya adalah seorang musyrikah. Kemudian turun wahyu Surah *al-Mumtahanah*: 8 yang memerintahkan untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam (Mohammad Fuad Al Amin Mohammad Rosyidi, 2019: 284).

Bangsa Indonesia juga diketahui sebagai bangsa yang menjemuk itu disebabkan oleh karena adanya perbedaan etnis, suku, agama, bahasa, budaya dan adat-istiadat. Perlu juga adanya kekuatan hukum untuk mengatur sikap toleransi yang ada di Indonesia, oleh karena ada beberapa orang yang memiliki pemahaman yang salah atau kurangnya pengetahuan tentang toleransi agama maka perlu adanya aturan hukum yang mengaturnya. Indonesia tidaklah teokrasi justru secara konstitusional Negara yang mengharuskan rakyatnya untuk memeluk satu dari sekian agama yang ada dan di yakini keberadaannya dan itu jelas tertuang dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 (Mario Chlief Taliwuna dan Veydy Yanto Mangantibe, 2021:34).

Negara memberikan kebebasan kepada rakyatnya memutuskan untuk menentukan satu agama menjadi keyakinannya apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu, kenyataan ini dengan sendirinya memaksa Negara untuk melibatkan dalam menata kehidupan beragama. Ketentuan dalam pasal 29 UUD 1945 sangat penting artinya bagi agama dan para pemeluknya karena telah memberi jaminan dan saran dalam keterlibatan umat untuk mengisi dan memperkaya kehidupan berbangsa.

Sekilas Mengenai Moderasi Beragama

Moderasi Beragama bukan hal yang absurd yang tidak bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama berikut ini serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan, terdiri dari: *pertama*, komitmen kebangsaan. Maksudnya ialah di mana Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan dalam menjunjung moderasi beragama. Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa", mencerminkan komitmen kebangsaan untuk menghargai keberagaman agama dan kepercayaan (Masbukin, Saifullah, dan Rhonny Riansyah, 2024: 25).

Masyarakat perlu membangun sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, sehingga tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan atau dikesampingkan. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Pendidikan kebangsaan yang *inklusif*, misalnya, menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk saling menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Contoh kongkret moderasi beragama dalam indikator komitmen kebangsaan bisa dilihat dalam perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas. Hal ini menciptakan

suasana kebersamaan dan menggugah rasa kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki keberagaman. Selain itu, upaya pembangunan rumah ibadah yang representatif dan adil bagi semua agama menunjukkan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Setiap agama diberi kesempatan yang sama untuk membangun tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan umatnya. Pemerintah juga berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan konflik antar umat beragama.

Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama juga tercermin dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kepercayaan yang kurang dikenal. Pemerintah dan masyarakat diharapkan memberikan ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok ini untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka tanpa diskriminasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai keberagaman agama dan kepercayaan menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik.

Dan tidak kalah penting, bahwa terdapat peran media massa dan teknologi informasi juga sangat penting dalam mempromosikan moderasi beragama sebagai bentuk komitmen kebangsaan. Media massa dan platform digital seharusnya digunakan untuk menyebarkan pesan toleransi dan kerukunan, serta memberikan informasi yang akurat dan seimbang tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih teredukasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, toleransi. Toleransi merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi bukan hanya sekadar sikap saling menghormati, tetapi juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan kekerasan, sehingga penting bagi setiap individu untuk mengekang diri dari prasangka dan kebencian. Toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masing-masing individu untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang unik dan berharga, sekaligus memperkaya kehidupan bersama dalam masyarakat yang beragam.

Sebagai contoh moderasi beragama dalam indikator toleransi, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan menghormati perayaan agama yang berbeda. Ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya turut berpartisipasi dalam kebahagiaan dan kebersamaan, seperti mengunjungi rumah tetangga yang merayakan, saling mengucapkan selamat, atau bahkan membantu persiapan. Hal serupa juga terjadi ketika umat agama lain merayakan hari besar mereka.

Selain itu, toleransi juga tercermin dalam bagaimana masyarakat bersikap terhadap keberagaman tradisi dan cara beribadah yang ada di Indonesia. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ibadah yang berbeda, seperti masjid, gereja, pura, atau vihara, saling menghormati dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan suara, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah yang sedang berlangsung. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif untuk kegiatan keagamaan dan menguatkan ikatan persaudaraan antar umat beragama.

Contoh lain dari toleransi dalam moderasi beragama adalah saling menghargai hak individu untuk memilih keyakinan dan cara hidup yang mereka anut. Tidak jarang kita melihat pernikahan antar agama yang diadakan dengan penuh kerukunan dan rasa saling menghormati. Baik keluarga maupun masyarakat sekitar mendukung dan menghargai keputusan kedua mempelai untuk bersatu dalam pernikahan dengan tetap menjaga keyakinan dan agama masing-masing. Ini merupakan wujud nyata dari toleransi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bukti bahwa moderasi beragama dapat terwujud dalam kehidupan nyata.

Ketiga, anti kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Kita harus memahami bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama melawan radikalisme dan intoleransi yang meresahkan kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya menghindari kekerasan atas nama agama, moderasi beragama mengedepankan dialog dan komunikasi yang efektif antara berbagai kelompok masyarakat. Melalui interaksi yang sehat dan konstruktif, kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan keyakinan, serta mengatasi kesalahpahaman yang sering kali menjadi akar permasalahan. Dialog antar umat beragama juga menjadi sarana untuk menemukan solusi terhadap konflik yang mungkin timbul karena perbedaan agama.

Salah satu contoh penerapan moderasi beragama dalam indikator anti kekerasan adalah kerja sama antara Pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengatasi potensi konflik antar umat beragama. Melalui pendekatan preventif dan persuasif, pihak-pihak terkait dapat menangani isu-isu sensitif dengan bijaksana dan mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini membantu mencegah tindakan kekerasan yang mungkin terjadi akibat ketegangan antar umat beragama.

Pendidikan juga menjadi instrumen penting dalam penerapan moderasi beragama yang anti kekerasan. Pendidikan yang inklusif dan mengajarkan nilai-nilai toleransi serta keberagaman sejak dini dapat membentuk karakter individu yang cinta damai dan menghargai perbedaan. Selain itu, melalui kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama, mereka dapat belajar untuk mengatasi perbedaan dan bekerja sama dalam suasana yang harmonis.

Media massa dan teknologi informasi juga memiliki peran penting dalam penerapan moderasi beragama yang anti kekerasan. Media massa perlu menyajikan informasi yang akurat dan seimbang tentang isu-isu keagamaan, serta menghindari pemberitaan yang cenderung memprovokasi dan memicu konflik. Di sisi lain, penggunaan media sosial dan platform digital harus digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi yang dapat memicu kekerasan.

Terkait ini, pemerintah sebagai aktor utama harus mengambil langkah tegas terhadap kelompok atau individu yang menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan kekerasan. Penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi instrumen penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan mengedepankan moderasi beragama yang anti kekerasan, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi seluruh masyarakat untuk hidup bersama dalam keberagaman yang kita miliki.

Keempat, penerimaan terhadap tradisi. Keberagaman budaya dan tradisi merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Moderasi beragama juga mencakup sikap akomodatif dan penerimaan terhadap perbedaan tradisi dan budaya. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bersikap terbuka dan menerima perbedaan, bukan justru menciptakan sekat dan perpecahan. Dengan demikian, keharmonisan dan persatuan bangsa akan terus terjaga. Penerimaan terhadap tradisi dan budaya dalam konteks moderasi beragama mencakup penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman cara beribadah, adat istiadat, dan tradisi yang ada di masyarakat. Setiap agama memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan praktik keagamaan, yang sering kali terkait dengan tradisi dan budaya lokal. Menghargai keberagaman ini menjadi wujud nyata dari penerapan moderasi beragama yang inklusif dan toleran.

Penerapan moderasi beragama dalam penerimaan terhadap tradisi dan budaya bisa dilihat dalam praktik keagamaan yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, perayaan Waisak di Borobudur yang melibatkan ritual keagamaan Buddha dan kebudayaan Jawa, atau perayaan Nyepi di Bali yang mencerminkan sinkretisme antara ajaran Hindu dengan adat istiadat Bali. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana keberagaman tradisi dan budaya diterima dan diakomodasi dalam konteks keagamaan. Selain itu, penerimaan terhadap tradisi dan budaya juga mencakup kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat lintas agama. Misalnya, perayaan Cap Go Meh di Singkawang, Kalimantan Barat, yang melibatkan umat Konghucu, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dalam suatu perayaan budaya yang meriah. Kegiatan seperti ini menciptakan suasana kebersamaan dan saling pengertian antara umat beragama, sekaligus melestarikan kebudayaan lokal (Kemenag.co.id, 2025).

Dalam konteks agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk Islam dikenal dengan istilah Islam *wasatiyah* atau Islam *moderat* yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleran, menjaga nilai luhur yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan, menerima setiap fatwa karena kondisi geografis, sosial dan budaya (Mustaqim Hasan, 2021: 114). Istilah moderasi biasa lazim digunakan untuk mengungkapkan sebuah posisi atau keadaan di tengah-tengah yang tidak berada di sisi kanan dan tidak pula berada di sisi kiri (M. Bakir dan K. Othman, 2017: 17). Istilah moderasi merupakan kata serapan yang diadopsi dari bahasa latin yaitu "*moderatio*" yang berarti sedang tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Dalam hubungannya dengan beragama, moderasi dipahami dalam istilah bahasa arab sebagai *wasat* atau *wasatiyah* sedangkan pelakunya disebut *wasit*. Kata *wasit* sendiri memiliki beberapa makna yaitu penengah, pelantara, dan pelerai (Ahmad Fauzi, 2018: 233).

Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan dan kebhinekaan. Sebagai Bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri Bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara nyata telah berhasil dan sukses menyatukan semua kelompok etnis, bahasa, suku, budaya dan agama. Indonesia dideklarasikan bukanlah sebagai negara agama, akan tapi juga tidak memisahkan antara agama dan kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai yang ada dalam agama dijaga, dipadukan dan disatukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal,

bahkan ada beberapa hukum agama yang dilembagakan oleh Negara, agar pelaksanaan ritual agama dan budaya berjalan dengan damai dan rukun (Mhd. Abror, 2020: 148).

Moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tenggang rasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Seruan untuk selalu menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama, atau warga kementerian agama namun seluruh warga negara Indonesia saja dan seluruh umat manusia (Jamaluddin, 2022: 10).

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak *ekstremisme* dan *liberalisme* dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat *multikultural* seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan (Fauziah Nurdin, 2021: 62). Moderasi beragama mengarahkan manusia untuk bersikap sesuai dengan keyakinannya. Akan tetapi, di satu sisi juga mengarahkan manusia untuk bersikap di tengah-tengah. Maksudnya ialah tidak mempersoalkan segala perbedaan yang ada pada sebuah agama, sehingga perbedaan yang ada tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diyakini oleh para pemeluknya masing-masing (Depi Dasmal, 2024).

Bentuk Moderasi Beragama yang muncul dari kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia

Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia menjadi pemberitaan yang cukup menjadi perhatian banyak kalangan, terutama masyarakat yang beragama katolik dan para tokoh agama. Uniknya, dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Paus Fransiskus selama berada di Indonesia, muncul beberapa aktivitas dengan pihak Muslim yang pada akhirnya menumbuhkan nilai moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Adapun bentuk nilai moderasi beragama yang lahir dari pertemuan Paus Fransiskus dengan tokoh Muslim di Indonesia, diantaranya:

1. Kedatangan Paus Fransiskus disambut dengan suka cita mayoritas masyarakat Indonesia

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia disambut suka cita masyarakat Indonesia terutama penganut agama Katolik. Rangkaian kegiatan terlaksana dengan baik dengan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo dan para pejabat lainnya. Beberapa kalangan juga memberikan berbagai reaksi positif dengan kedatangan orang nomor satu agama Katolik tersebut untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia yang beragama Katolik (Komdigi.co.id, 2025).

Fenomena tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap toleransi yang tinggi dengan beragamnya perbedaan agama di negara sendiri. Penerimaan masyarakat dengan dibuktikan suka cita dalam menyambut Paus Fransiskus perlu dilestarikan sehingga masyarakat benar-benar memahami bahwa perlu dewasa dalam memahami keberagaman yang sejatinya harus dipahami secara sadar. Hal ini terbukti

dengan berlangsungnya semua kegiatan Paus Fransiskus dan pengikutnya dengan lancar serta dilayani dengan baik oleh Pemerintah dan pihak-pihak tertentu.

2. Misi Paus Fransiskus yaitu untuk menyuarkan umat agar hidup rukun dalam bingkai perbedaan agama

Salah satu tujuan dari datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia ialah menyuarkan umat agar hidup rukun dalam perbedaan keyakinan. Hal ini menjadi salah satu sumber di mana lahirnya kedamaian dan kesejahteraan hidup bagi segenap masyarakat di Indonesia. Jika masyarakat saling bertoleran, maka akan dipastikan perbedaan yang ada bukan menjadi sebuah masalah. Namun sebaliknya, jika masyarakat menjadikan perbedaan agama dan keyakinan sebagai penghalang serta beban hidup, maka inilah sumber ketidakdamaian masyarakat dalam menjalani kehidupan. Maka dengan itu, sangat perlu diapresiasi visi dari Paus Fransiskus datang ke Indonesia dikarenakan ingin menebar kedamaian antar masyarakat.

Paus juga menambahkan bahwa jangan ada masyarakat Indonesia yang menyerang kelompok agama yang berbeda keyakinan, sehingga perbedaan bukan sebagai beban melainkan upaya untuk merawat silaturahmi sesama manusia ciptaan Tuhan. Penyampaian ini menjadi sebuah penguatan bersama untuk segenap masyarakat Indonesia agar hidup dengan rukun dan tidak mempersoalkan kembali perbedaan-perbedaan yang ada antar agama (Suarasurabaya.net, 2025).

3. Paus Fransiskus mencium tangan Imam besar Masjid Istiqlal dan Imam Besar Masjid Istiqlal mencium kepala Paus Fransiskus

Salah satu pemandangan yang cukup menarik banyak perhatian masyarakat dari rentetan kegiatan yang dilaksanakan oleh Paus Fransiskus di Indonesia ialah di mana Paus Fransiskus pada sebuah momen terlihat mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal dan Imam Besar Masjid Istiqlal pun mencium kepala Paus Fransiskus. Fenomena ini menandakan bahwa nilai-nilai moderasi beragama terbentuk meskipun terpisah oleh perbedaan keyakinan (Kompas.com, 2025).

Hal tersebut juga menggambarkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah masalah besar dan dipersoalkan. Namun, menjadi peluang untuk membangun nilai kekeluargaan dan sebagai cara untuk menghormati sesama manusia. Itulah yang dipraktekkan oleh dua tokoh tersebut yang menjadikan perbedaan bagian dari kehidupan sesama makhluk Tuhan. Berbagai kalangan dan pihak banyak merespon positif atas apa yang diperlihatkan oleh Paus dan Imam Masjid Istiqlal. Hal ini menjadi sebuah kesejukan terutama antara masyarakat Muslim dengan Katolik sehingga diharapkan dapat hidup rukun. Keharmonisan ini diharapkan dapat dirawat bersama agar persatuan dan kesatuan sebagai makhluk sosial dapat dijaga dengan sebaik mungkin.

4. Penjagaan dari pihak keamanan melalui Polri dan TNI selama kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia

Salah satu bentuk jaminan Pemerintah agar selama kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia berjalan dengan kondusif, maka telah disiapkan keamanan dari kepolisian dan TNI untuk mengawal segala kegiatan yang ada. Hasilnya terbukti bahwa semua

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia berjalan aman, lancar dan tanpa ada gangguan. Kondusifnya rangkaian acara tersebut menandakan betapa tingginya nilai toleransi dan gaya menghargai Pemerintah untuk tokoh dunia yang mengunjungi saudara-saudaranya di Indonesia. Hal ini sekali lagi memberikan gambaran betapa bijaksananya masyarakat Indonesia melalui Pemerintahan dalam menghargai setiap tokoh agama yang datang ke tanah air. Di samping itu, tidak ada gangguan atau persoalan-persoalan yang muncul selama rangkaian kegiatan yang pada akhirnya menjadikan momen kegiatan Paus di Indonesia dapat dikatakan lancar tanpa masalah serius (cnbcindonesia.com, 2025).

Kesimpulan

Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia melahirkan sebuah keindahan dari sisi kemanusiaan dan menjadi sebuah harapan untuk menguatkan langkah keberagamaan Indonesia ke depan dalam membangun sikap toleransi dan menguatkan barisan dalam bingkai perbedaan. Kedatangan Paus ke Indonesia berjalan lancar dan penuh dengan apresiasi dari segenap tokoh lintas agama termasuk masyarakat muslim Indonesia, hal ini terlihat dengan sambutan segenap masyarakat terutama yang beragama Katolik maupun muslim dengan menerima kedatangan tokoh agama Katolik tersebut ke tanah air. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, sejatinya kehadiran beliau ke Indonesia di penghujung tahun 2024 memberikan penguatan untuk semua pihak agar sama-sama menguatkan barisan untuk selalu hidup damai dalam bingkai perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman", *Rusydhiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1 No. 2 (Desember: 2020)
- Al-Maudūdi Abu Al-A'la , *Al-Islām fi Muwājihati al-Tahaddiyāt al Mu'āshirah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1980)
- Anwar Syaeful dan Mahmudi, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 6 No. 4 (2024)
- Azizah Moulida, Raja Oloan Tumanggor, Gea Hayfatunisa, Adinda Andriyani, Shyakia Niziliani, dan Ananda Natahsya, "Peran Media Sosial dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Pada Generasi Z", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 4 (2024)
- Balitbangdiklat.kemenag.go.id
- Bakir, M & Othman, K, A Conceptual Analysis of Wasatiyyah (Islamic Moderation-IM) from Islamic Knowledge Management (IKM) Perspective. *Revelation and Science*, Vol. 7 No. 1 (2017)
- Cnbcindonesia.com
- Dasmal, Depi, *Moderasi beragama Sebagai Penguat Karakter Siswa MAS Al-Falah dalam Mempekokoh Persatuan dan Kesatuan*", Workshop Moderasi Beragama di MAS Al-Falah Padang, 15 Oktober 2024
- Fatimah Siti, Shohibul Adib, Muzayyin, Agus Salim Chamidi, Sesi Triana Rahayu, Ali Fajar, Erikatul Khusnia, Lina Ni'matul Ma'wiyah, Lailatul Khurul Aini, Aziz Arwani, dan Arsela Titin Cahyani, "Pengarutusan Moderasi Beragama Bagi Pemuda Desa

- Sikayu Melalui Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development)", *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 (Agustus: 2023)
- Fauzi, Ahmad, "Moderasi Islam, untuk Peradaban dan Kemanusiaan", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 2 (2018)
- Hasan, Mustaqim, "Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa", *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7 No. 02 (Juli-Desember: 2021)
- Ihsani Muhammad Hanif, "Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia", *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 3 (Juli: 2022)
- Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama)", *AS-SALAM: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 7 No.1 (Februari: 2022)
- Kumparan.com
Kemenag.co.id
Komdigi.co.id
- Kusnadi dan Nisa Arafiah Tri Wulandari, Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial, "*Jurnal Basicedu*, Vol. 8 No. 1 (Februari: 2024)
- Mahbubah Latifatul, Yudi Suharsono, dan Lutfi Mukhtar, "Implementasi Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang", *Proceeding Of The 1st International Conference Cultures & Languages*, Vol. 1 No. 1 (2022)
- Masbukin, Saifullah, dan Rhonny Riansyah, "Moderasi Beragama Dan Pancasila: Pilar Kebhinekaan dan Persatuan Bangsa Indonesia", *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 20 No. 1 (Juni: 2024)
- Naj'ma Dinar Bela Ayu & Syamsul Bakri, "Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan", *Academica: Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5 No. 2 (July-December: 2021)
- Nurdin, Fauziah, "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, Vol. 18, No. 1 (Januari: 2021)
- Rosyidi Mohammad Fuad Al Amin Mohammad, "Konsep Toleransi Dalam Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat Indonesia", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9 No. 2 (Agustus: 2019)
- Sinay Siti Barora, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law", *de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Juni: 2020)
- Shalihin Nurus, Dina Sari Hasibuan, M Yusuf, dan Muliono Muliono, "Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 5 No. 2 (2021)
- Suarasurabaya.net
- Taliwuna Mario Chlief dan Veydy Yanto Mangantibe, "Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, Vol. 3, No. 1 (Juni: 2021)